

PERSEPSI KEBANGSAAN SISWA KRISTEN DI AMBON

Paisal

Peneliti Balai Litbang Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar
fawwazmowaviq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi kebangsaan siswa Kristen di Kota Ambon yang merupakan bagian dari penelitian Balitbang agama Makassar dengan judul yang sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mix method) atau pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan harapan mix method ini cukup akurat dan berguna untuk memahami hasil penelitian, dengan menggunakan sekuensial explanatory untuk menerangkan hasil kuantitatif yang diperoleh dari menebar kuisioner dengan data kualitatif, data kualitatif diperoleh dengan metode studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan secara umum persepsi kebangsaan siswa Kristen di Kota Ambon sangat tinggi ini terlihat dari beberapa Aspek yang dinilai; aspek NKRI dan cinta tanah air mayoritas siswa menerima dengan bulat bentuk Negara Kesatuan begitupula dengan aspek Penerimaan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang tidak bisa ditawar-tawar, demikian halnya untuk aspek kebhinnekaan. Meski demikian terdapat beberapa variabel yang kurang disetujui oleh responden diantaranya soal sikap terhadap produk-produk buatan dalam negeri dan penggunaan produk bajakan, yang lain adalah soal jika ada pelarangan terhadap penggunaan symbol keagamaan di sekolah, aspek kepatuhan terhadap hukum merupakan satu aspek yang agak menurun. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya aspek kebangsaan yakni penguatan atau sosialisasi yang cukup massif dilakukan pasca konflik Ambon dan berdasarkan ajaran agama Kristen. Terkait tren meningkatnya pemakaian simbol keagamaan di ruang publik dipengaruhi oleh keinginan menunjukkan eksistensi diri yang juga dipengaruhi oleh segregasi pasca konflik..

Kata Kunci: kebangsaan, nasionalisme, siswa, siswa kristen, Ambon,

PENDAHULUAN

Salah satu pilar penting dalam upaya pembangunan mentalitas bangsa Indonesia yang paripurna adalah pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi instrumen penting dalam upaya menciptakan dan menyiapkan generasi-generasi yang nantinya mengambil peran penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan sepatutnya mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah Indonesia, baik dari sisi suprastruktur (misalnya undang-undang atau peraturan yang jelas mengenai eksistensi lembaga pendidikan) atau pun sisi infrastruktur (misalnya pendanaan, perbaikan

sarana dan lain-lain).

Tantangan lembaga pendidikan nasional saat ini muncul dari dua arah yang bersifat internal dan eksternal. Tantangan internal adalah carut marutnya sistem pendidikan nasional yang berimplikasi pada ketidakmampuan sistem pendidikan kita menjawab persoalan-persoalan bangsa yang bersifat moral seperti kasus korupsi dan kekerasan. Bahkan kecenderungan korupsi juga mewabah di kalangan sekolah. Ada banyak kasus dimana pihak sekolah melakukan pemungutan ekstra di luar ketentuan atau kasus penyelewengan dana bos.

Tantangan eksternalnya adalah penetrasi nilai-nilai modern melalui struktur kebudayaan populer begitu mewabah di kalangan remaja usia sekolah (terutama SMP dan SMA). Kasus narkoba, seks bebas, dan kehidupan malam telah menjadi tren di kalangan anak-anak muda dan yang paling parah menurunnya sikap kebangsaan atau nilai nasionalisme yang dianut siswa milenial. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan, mengingat bangsa Indonesia memiliki akar-akar budaya yang sangat religius dan sangat menghargai negara bangsa yang majemuk ini. Di tengah perubahan kebudayaan dunia dewasa ini perlu segera dirumuskan dan dilaksanakan politik pendidikan yang afirmatif agar kebudayaan nasional kita tidak mengalami rongrongan terutama pada generasi muda. Sistem pendidikan nasional perlu merumuskan suatu sistem yang integratif dan resistentif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan konteks dalam percaturan dunia modern.

Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan dan multikultural di sekolah-sekolah umum. Sejauh ini, pembelajaran kebangsaan di sekolah-sekolah umum dalam pembelajaran PKN hanya bersifat “suplemen” dengan jumlah jam yang relatif sedikit. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dugaan minimnya nilai kebangsaan, nilai patriotisme yang dimiliki siswa karena kurangnya kegiatan yang bisa membentuk pola sikap seperti itu. Tentu saja jika hal ini betul terjadi cukup mengkhawatirkan sebab dapat menjadi ancaman bagi keutuhan negara.

Dalam riset ini digunakan istilah persepsi, yang berasal dari bahasa Inggris (*perception*), yang dalam KBBI *online* V (2019), kata persepsi memiliki arti tanggapan

(penerimaan) langsung dari sesuatu. Walgito (2002) menjelaskan persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Pendapat lain dari Leavitt (1978) persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Kebangsaan dalam KBBI Digital V (2019) adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, atau secara harfiah disebut perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa dan secara lebih spesifik merupakan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Kata Nasionalisme seringkali digunakan sepadan dengan kebangsaan. Masih dalam KBBI Digital V, nasionalisme disebut sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas dan kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.

Beberapa ahli mencoba untuk mendeskripsikan nasionalisme. Smith mendefinisikannya sebagai gerakan sosiopolitik yang membantu warga suatu negara untuk mencapai otonomi, mempertahankan kemerdekaan, memperkuat kesatuan, dan mengembangkan identitas dirinya (Smith, 2013). Definisi ini menekankan peran dari elemen kesatuan, otonomi, dan identitas yang membantu warga negara mencapai tujuan cinta tanah air. Definisi berbeda dikemukakan oleh Haas (1997). Ia menghubungkan konsep nasionalisme dengan kehendak untuk

menghubungkan negara. Menurutnya, nasionalisme adalah doktrin solidaritas sosial yang melandasi keyakinan suatu kelompok yang menjadi bagian dari suatu bangsa atau kelompok yang ingin membentuk suatu bangsa. Meskipun ada perbedaan, definisi Haas mengandung elemen cinta tanah air. Definisi tersebut mengaitkan cinta tanah air warga negara dengan keinginan mereka untuk menjadi bagian darinya atau untuk membentuknya (Alhethail, 2015).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan /warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, dan kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme memuat beberapa prinsip, yaitu kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mix method). Metode penelitian kombinasi adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Disini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan-temuan, dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi atau program penelitian (Mertens, 2010).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi kebangsaan siswa Kristen di Kota Ambon yang merupakan bagian dari penelitian Balitbang agama Makassar dengan judul yang sama dengan menysasar 5 kota dan jumlah total sampel sebanyak 1200 responden. Sebagai bagian

penelitian regular tulisan ini menysasar sampel populasi siswa SMA yang beragama Kristen di Kota Ambon. Yang pertama menentukan sekolah sasaran dengan metode sampling, dan terpilih 10 sekolah. Berikutnya dilakukan sampling untuk memilih 22 siswa yang akan menjadi responden di setiap sekolah yang terpilih. Langkah pertama adalah pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan mengedarkan angket kepada 220 responden.

Berdasar temuan lapang, jumlah sekolah setingkat SMA terdiri atas 34 buah dan sebanyak 14 merupakan berstatus negeri dan 20 swasta. Sedangkan pada Sekolah kejuruan terdiri atas 7 sekolah negeri, dan 3 sekolah berstatus swasta. Jumlah siswa terdiri atas 16.459 dengan 12.384 menempuh pendidikan di SMA, dan 4.075 siswa memilih bersekolah di Sekolah Menengah Atas Kejuruan.

Setelah mendapatkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang membawahi langsung sekolah setingkat SMA, kami melakukan metode random untuk menentukan 10 sekolah terpilih sebagai sasaran penyebaran angket, berikut 10 sekolah terpilih dan 2 sekolah cadangan. Rencana pengambilan sampel lapangan dengan sasaran sekolah-sekolah yang ada siswa Kristen dengan melibatkan Pembantu Lapangan dari Pengawas tingkat SMA/SMK Kota Ambon.

Responden yang menjadi penelitian ini berasal dari 10 sekolah yang tersebar di kota Ambon. Sekolah tersebut adalah: SMA Negeri 10 Ambon di negeri Latuhalat, SMA Negeri 2 Ambon terletak di jalan Jan Paays, SMA Negeri 4 Ambon jalan Wolter Monginsidi, Lateri, SMA Negeri 5 Ambon jalan Monginsidi Lateri, SMA Negeri 6 Ambon Jalan Aman Huse negeri Amahusu. Berikutnya SMA Swasta Kartika VIII Jalan

Tamaela, SMA Maria Mediatrix Ambon Jalan Dr. Malaiholo, SMA Swasta Xaverius jalan Pattimura. Selanjutnya SMK Negeri 7 terletak di Jalan OT Pattimaipauw dan SMK Negeri 2 Ambon.

Angket tersebut dikonstruksi untuk mengungkap data kuantitatif, yaitu persepsi siswa beragama Kristen terhadap isu kebangsaan dan keagamaan. Angket menggunakan Skala Likert yang biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari individu dan kelompok tentang fenomena sosial. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya akan didalami dengan metode kualitatif. Metode kualitatif tersebut mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, telaah dokumen, maupun FGD. Analisis data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data (Prasetyo & Jannah, 2011).

Ada dua tahapan analisis data. Pertama, data kuantitatif dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan distribusi frekuensi. Adapun data kualitatif dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan sebagaimana yang diutarakan oleh Miles & Huberman (Sugiyono, 2007), yaitu reduksi data, display, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Geografis-Demografis; Merajut Citra Diri Ambon Manise

Ambon adalah salah satu di antara delapan daerah tingkat dua yang ada dalam wilayah Propinsi Maluku, yang berstatus kota dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Maluku, sedangkan daerah tingkat dua lainnya berstatus kabupaten. Ketujuh daerah lainnya dengan status kabupaten adalah Buru, Maluku tengah, Maluku Tenggara,

Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat; dan Seram Bagian Timur.

Kota Ambon berbentuk menyerupai mulut naga yang sedang menganga, dipisahkan oleh teluk Ambon dan bersambung di daratan sempit Passo, yang lebarnya lebih kurang satu kilo meter merupakan bagian dari negri Passo. Di sebelah barat dari daratan sempit Passo ini terdapat teluk Ambon dan disebelah timurnya teluk baguala. Untuk sampai di Kota Ambon dari berbagai daerah, dapat digunakan jalur pelayaran laut dan udara.

Pemukiman penduduk di Kota Ambon telah ditata dengan baik dan teratur. Pemukiman penduduk terkonsentrasi di sepanjang pantai baik jazirah Leihitu maupun Leitimur, dua buah jazirah yang dibelah oleh teluk Ambon. Perumahan penduduk berada di tanah yang miring mulai dari garis pantai sampai jarak tertentu masuk kedaratan dan lereng perbukitan. Konsentrasi penduduk di sepanjang garis pantai menyebabkan sebagian besar desa di kota Ambon berada di daerah pesisir. Kantor statistik mencatat, 72% dari 50 buah desa di Kota Ambon berada di daerah pantai. Pola pemukiman yang terkonsentrasi demikian ini telah berlangsung sejak pertengahan abad ke 17 ketika Belanda mengharuskan penduduk yang tinggal di pegunungan untuk turun kepesisir pantai agar mudah mendapat pengawasan. Pola itu terus di pakai sampai dengan Belanda meninggalkan Maluku.

Konsentrasi pemukiman masyarakat pasca konflik Ambon hingga sekarang terbagi dua sesuai dengan keyakinan (agama), ada pemukiman Kristen dan ada pemukiman Islam, artinya pasca konflik siapa yang minoritas ditempat tersebut harus angkat kaki bergabung dengan masyarakat seagamanya, jadi jangan heran kalau sepanjang jalan terdapat rumah ibadah yang

tidak diperbaiki, berarti telah ditinggalkan oleh umatnya karena mereka minoritas, tetapi terkadang dalam satu tempat masjid dan gereja dua-duanya tidak menjadi korban konflik berarti tempat itu adalah daerah netral.

Data kependudukan di Kantor Statistik mengisyaratkan keberadaan jumlah penduduk dalam perkembangannya cukup bervariasi. Jumlah penduduk kota Ambon tahun 2017 adalah sebanyak 411.617 jiwa laki-laki 205.684 dan perempuan 205.933 jiwa perkembangan yang cukup mencengangkan dibanding dengan data tahun 2010 adalah 284.809 jiwa, terdiri dari laki-laki 143.869 jiwa dan perempuan 140.940 jiwa. Berdasarkan hasil registrasi penduduk kota Ambon, angka penyebaran penduduk bila dibandingkan luas wilayah yang ada, maka terlihat tidak merata untuk masing-masing kecamatan, dimana konsentrasi penduduk ada di Kecamatan Nusaniwe dan Sirimau. Secara keseluruhan tercatat kepadatan penduduk di Kota Ambon sebesar 717 jiwa perkilometer persegi.

Kota Ambon sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial sama seperti kota-kota lainnya di Maluku menjad pusat konsentrasi manusia dari berbagai latar belakang etnis, budaya, maupun agama dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai sentral seluruh kegiatan, termasuk pusat pendidikan, Kota Ambon memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari berbagai penjuru desa yang ada di Maluku maupun luar Maluku. Karenanya proses migran spontan terjadi di Kota Ambon mulai permulaan abad 17.

Para migran anak Negeri Sarani dari daerah pedesaan datang ke kota Ambon, umumnya untuk kepentingan pendidikan dan pegawai pemerintah. Sedangkan migran Anak Negeri Salam datang ke kota ini lebih

untuk kepentingan ekonomi sebagai pedangang, dan sedikit sekali yang datang untuk kepentingan pendidikan maupun sebagai pegawai pemerintah. Sedangkan migran dari luar Maluku bermigran ke kota Ambon karena kepentingan ekonomi.

Para migran dari daerah pinggiran yang masuk kekota Ambon kemudian membentuk komunal teritorial mereka di daerah asal terutama pasca konflik Ambon, walaupun komunal itu tidak lagi homogeny seperti konsep Anak Negeri atau Orang Dagang. Sebaliknya, para migran dari luar Maluku, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Jawa, dahulu membentuk komunal tersendiri berdasarkan latar belakang etnis dan pasca konflik berkembang membentuk komunal berdasarkan agama (seperti telah dikemukakan). Pola pemukiman yang terpisah di kota Ambon dengan masyarakat yang semakin heterogen ini mengurangi sentiment kelompok dalam berbagai latar belakang, yaitu sentiment kelompok agama, ikatan negeri, maupun etnis dilihat dari segi pemukiman dan terjadinya konflik Ambon adalah kumulasi dari berbagai kepentingan.

Seiring perkembangan pemerintahan dan politik, pendidikan dan ekonomi, Kota Ambon sebagai sentral seluruh kegiatan tersebut semakin dipadati para imigran dari berbagai daerah sekitar (lokal). Juga migran daerah lain, terutama Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar-Toraja), Sulbar dan Sulawesi Tenggara (Buton-Muna). Dalam dinamikanya, kota Ambon kemudian menjadi tumpuan untuk mencari lapangan kerja baru. Orang Ambon Sarani dengan bekal pendidikan yang relatif tinggi melalui orientasi kerja pada birokrasi.

Sebaliknya, orang Ambon Salam sebagian berorientasi kerja pada sektor ekonomi berskala kecil. Pendetang suku bangsa Cina dan Arab, yang pada dasarnya

mendatang Maluku karena kepentingan ekonomi, berorientasi kerja pada sektor ekonomi berskala besar dan menengah, sedangkan para pendatang dari Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar-Toraja) berorientasi pada sektor ekonomi berskala kecil dan jasa, dan pendatang dari dan Sulawesi Tenggara (Buton-Muna) berorientasi kerja pada sektor pertanian tanaman pangan. Selain itu para pendatang dari Jawa dan Sumatera (Padang-Palembang) juga berorientasi kerja pada sektor ekonomi kecil dan jasa.

Perkembangan Kota Ambon yang semakin pesat dengan proses migrasi yang tinggi dan tidak diimbangi kebijakan kependudukan yang berbasis pada daya dukung pulau, mengakibatkan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini membuat ruang gerak warga kota semakin sempit, dan komposisi penduduk berdasarkan agama mengalami perubahan. Sebelumnya untuk Kota Ambon perbandingan antara pemeluk agama sekitar 65% beragama Kristen dan 35% beragama Islam. Ini kemudian perlahan berubah dan pada tahun 1998 berubah menjadi sekitar 51,92% Kristen dan 42,38% Islam, Katolik 5,5% dan lainnya sebanyak 0,25%. Akibatnya persaingan secara ekonomis, baik terhadap ruang (tanah) maupun lapangan kerja semakin ketat. Perlu dikemukakan, bahwa perbandingan keagamaan masyarakat di Kota Ambon berimbang antara Islam dan Kristen, sedangkan di Provinsi Maluku (semua Kabupaten/Kota) Mayoritas Islam.

Di sini lain, pada sektor publik (birokrasi) yang selama ini didominasi oleh para pendatang maupun Anak Negeri Salam. Hal ini kemudian diperparah lagi oleh pola rekrutmen calon pegawai birokrasi yang cenderung mengambil konsensus.

Akibatnya yang terjadi hambatan sosial-ekonomi dikalangan para pencari kerja yang miskin koneksi di jajaran birokrasi.

Beragamnya motivasi kelompok dalam masyarakat di Kota Ambon ini terjadi berbagai kepentingan sosial-ekonomi, mengakibatkan terjadinya perubahan pola hubungan sosial, terutama pada kelompok masyarakat asal negeri-negeri seputar Maluku, yaitu dari pola hubungan yang berbasis budaya tolong-menolong dan saling menghormati sesuai kewajiban sosial dan ritual ke pola hubungan yang berorientasi pada kepentingan yang bersifat ekonomi. Perubahan pola hubungan sosial ini semakin memperkuat solidaritas kelompok yang berbasis agama, menimbulkan persaingan semakin ketat.

Persepsi Kebangsaan Siswa Kristen di Ambon *Identitas Responden*

Responden yang menjadi penelitian ini terdiri 40,5% atau 89 orang siswa berjenis kelamin laki-laki dan 59,5% atau 131 orang berjenis kelamin perempuan. Rentang usia responden mayoritas pada usia 16-17 tahun. Kategori 15 tahun sebanyak 9,1% atau 20 orang siswa, berusia 16 tahun 93 orang siswa atau 42,3%, usia 17 tahun sebanyak 93 orang siswa atau 42,3%, usia 18 tahun sebanyak 11 orang siswa atau 5,0% dan siswa berusia 19 tahun 3 orang atau 1,4% dari keseluruhan responden.

Mayoritas responden merupakan siswa jurusan IPA yakni sebanyak 128 siswa atau 58,2%, 24,5% atau 54 orang siswa mengambil jurusan IPS, responden yang berasal dari Kejuruan sebanyak 37 orang atau 16,8% dan 1 orang tidak menjawab. Dalam hal keaktifan berorganisasi terdiri dari kategori pengurus inti sebanyak 25 orang responden atau 11,4%, anggota biasa

sebanyak 64 orang atau 29,1% dan mayoritas responden adalah bukan pengurus organisasi siswa sebanyak 130 orang atau mencapai 59,1%, sisa 1 orang responden yang tidak menjawab.

Terdapat 4 aspek yang diukur dalam penelitian ini yakni; Aspek Kedaulatan NKRI dan Cinta Tanah Air, Aspek Mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, Aspek Penerimaan terhadap Kebhinnekaan dan Aspek Kepatuhan Terhadap Hukum.

Aspek kedaulatan NKRI dan Cinta Tanah Air

Terdapat 13 pertanyaan atau pernyataan terkait dengan aspek “Kedaulatan NKRI dan Cinta Tanah Air”. Dalam hal bentuk negara NKRI merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, pilihan mayoritas siswa di Ambon mencapai 80% yang sangat setuju dan 18,2% yang setuju totalnya mencapai 98,2% yang menganggap bentuk NKRI sudah final sisanya 1,4 kurang setuju dan 0,5 (satu orang) tidak setuju. Pernyataan berikut cukup linear dengan pernyataan diatas adalah kewajiban bela Negara sebanyak 87,7% siswa sangat setuju 11,4% setuju untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hanya 0,9% atau 2 orang siswa yang kurang setuju.

Yang menarik dalam pernyataan berikutnya dalam bagian ini adalah, meskipun setuju bentuk NKRI sudah final dan sepakat untuk mempertahankannya namun dalam pernyataan tindakan tegas terhadap mererka yang berusaha melepaskan diri dari NKRI kecenderungan pilihannya menurun menjadi 43,6% saja yang Sangat Setuju dan 32,7% yang memilih setuju, Yang memilih kurang setuju juga meningkat menjadi 17,7% dan 5,9% yang tidak setuju.

Tingkat optimisme terhadap keberadaan

Pancasila sebagai perekat perbedaan dalam bingkai NKRI cukup tinggi yakni sebanyak 69,1 % siswa yang memilih sangat setuju dan 28,6% yang setuju, sisanya 1,4% atau 3 orang siswa kurang setuju, dan 0,9% tidak setuju (2 orang siswa). Begitu juga dalam pertanyaan berikut soal apakah gejolak yang terjadi akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia mayoritas siswa tidak sepakat hal tersebut aakan memicu perpecahan yakni 55% sangat setuju dan 33,6% setuju dan hanya terdapat 10,5% yang kurang setuju dan 0,9 yang tidak setuju. Kebanggaan terhadap Negara juga sangat tinggi mencapai 87,7% yang sangat setuju dan 11,4% yang setuju. Kecenderungan jawaban tersebut linear dengan rangkaian pola jawaban dalam soal berikutnya, soal bela Negara ini cukup tinggi 69,5% Sangat setuju dan 28,6% yang setuju dan hanya 1,8% siswa yang memilih kurang setuju.

Bagi siswa Kristen, menghormati bendera resmi negara tidak menjadi hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini terlihat dari pola pilihan mayoritas siswa terhadap pernyataan tersebut, hanya terdapat 1,8% yang kurang setuju dan 1,8% yang tidak setuju, 66,8% menyatakan sangat setuju dan 29,5% memilih setuju. Meskipun ddianggap tidak bertentangan dengan ajaran agamanya namun frekuensi pilihan responden terhadap pengibaran bendera di rumahnya setiap perayaan kemerdekaan agak menurun “hanya” 50,9% yang memilih sangat Setuju dan memilih setuju sebanyak 38,7%. Kebanggaan terhadap lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sangat tinggi mencapai 72,3% yang sangat setuju dan 25,5% memilih setuju.

Yang menarik dalam soal perilaku adalah pilihan responden terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri yang menurun tajam frekuensinya terlihat dalam pernyataan

nomor 9 dan 13. Dalam hal membeli produk-produk dalam negeri 33,2% responden memilih sangat setuju dan 46,8% setuju, terdapat total 20% yang kurang setuju 15,9% dan 4,1% tidak setuju. Begitu halnya apakah senang menggunakan produk-produk bajakan 36,4% sangat setuju dan 41,4% setuju, memilih kurang 8,2% 14,1% tidak setuju.

Aspek Mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Aspek mempertahankan pancasila sebagai ideology negara pola jawaban siswa yang menjadi responden penelitian ini cenderung konsisten. Pernyataan Pancasila adalah dasar dan falsafah negara RI sebanyak 80,5% responden menjawab sangat setuju 16,4% memilih setuju dan hanya 1,4% yang kurang setuju dan terdapat 1,8% responden yang tidak setuju. Dalam hal Setiap warga negara harus hafal Pancasila sebanyak 70,0% memilih sangat setuju, 28,6 setuju dan hanya 1,4% yang kurang setuju. Untuk memberikan pemahaman terkait ideology pancasila pengajaran Pancasila di setiap jenjang pendidikan harus dilakukan sebanyak 80,5% responden memilih sangat setuju 18,6% setuju dan hanya 0,9% atau 2 orang siswa yang memilih kurang setuju.

Dalam hal menjaga dan mempertahankan Pancasila mayoritas siswa yang menjadi responden penelitian ini sepakat, terlihat dalam pernyataan “ideologi Pancasila harus tetap dipertahankan dan tidak boleh diganti dengan ideologi apapun juga” sebanyak 78,2% Sangat Setuju 20,5% setuju, sisanya 0,5% kurang setuju 0,9% tidak setuju. Pernyataan berikut “Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai dasar Negara” responden mutlak memilih Sangat setuju 88,8% dan 13,2% setuju.

Pernyataan berikutnya; “Di Indonesia tidak boleh ada ideologi lain selain Pancasila”, sebanyak 67,7% siswa sangat setuju, 28,6% setuju dan hanya yang memilih 2,3% kurang setuju dan 1,4% tidak setuju. Responden juga cukup percaya keberadaan pancasila dapat membantu mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat Indonesia terlihat dalam pernyataan berikut “Dengan berdasarkan Pancasila, Indonesia akan dapat mencapai masyarakat yang sejahtera” sebanyak 64,1% responden memilih sangat setuju dan 33,2% memilih setuju, sisanya 2,3% kurang setuju, dan 0,5% tidak setuju.

Untuk pernyataan “Nilai-nilai pancasila juga diajarkan oleh agama saya, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama saya” responden nampak terbaca cukup memahami nilai pancasila yang terdapat dalam agamanya, hal ini terlihat dari pola jawaban responden 56,8% memilih sangat setuju dan sebanyak 40,5% setuju, sisa 1,4% kurang setuju dan 1,4% lagi yang tidak setuju sama sekali.

Keyakinan terhadap Pancasila sebagai perekat pemersatu bangsa terlihat dari tingginya frekuensi pilihan terhadap pernyataan “Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, budaya dan agama, Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa” sebanyak 83,6% Sangat setuju, 14,5% responden memilih setuju sisanya 1,4% kurang setuju dan 0,5% tidak setuju.

Pilihan responden untuk mempertahankan Pancasila juga terlihat dari pernyataan “Pancasila bisa diganti jika tidak sesuai dengan perkembangan zaman” sebanyak 8,6% sangat setuju, 5,9% setuju, 24,5% responden kurang setuju dan mayoritas sebanyak 60,9% responden Tidak setuju. Untuk menjaga transformasi pengetahuan tentang pancasila bisa

berkesinambungan “Pancasila penting untuk diajarkan di kelas” sebanyak 62,3% memilih sangat setuju, 35,5% setuju dan hanya 1,4% kurang setuju dan 0,9% responden yang tidak setuju sama sekali.

Keberadaan pancasila sebagai penjaga keharmonisan mereka yang beragama menjadi penting terlihat dari pola jawaban responden untuk pernyataan “Pancasila mampu mengatasi perbedaan antar kelompok/golongan agama dan suku di Indonesia” sebanyak 64,1% Sangat setuju, 30,9% setuju, sisa 3,2% kurang setuju dan 1,8% tidak setuju. Meskipun begitu nampaknya tidak diamalkannya Pancasila secara murni dan konsekuen bukan menjadi penyebab konflik antar umat dan agama terlihat dari jawaban responden berikut persentasenya berbeda “Konflik antar suku dan agama di Indonesia terjadi karena Pancasila tidak diamalkan secara murni dan konsekuen” hanya 28,2% yang sangat setuju, 40,5% setuju dan terdapat 31,4% responden yang memilih sebaliknya yakni 19,1% yang memilih kurang setuju serta 12,3% responden memilih tidak setuju.

Aspek Penerimaan terhadap Kebhinnekaan

Aspek berikut yang diukur adalah soal keragaman dalam Negara Indonesia. Pernyataan pertama soal “Keanekaragaman suku dan budaya harus kita jadikan modal pembangunan, bukan justru kita jadikan sumber konflik” 74,1% responden menjawab Sangat setuju, 23,2% menjawab setuju dan hanya 1,4% kurang setuju serta 1,4% memilih tidak setuju. Serupa dengan pernyataan berikutnya soal “Keanekaragaman suku dan budaya merupakan kodrat, yang harus dijunjung dan dihormati setiap orang” 70,5% menjawab sangat setuju, 26,8% setuju dan hanya 1,8%

memilih kurang setuju serta 0,9% menjawab tidak setuju.

Terkait kerukunan antar etnis dan agama frekuensinya juga cukup tinggi, terlihat dalam jawaban untuk pernyataan “Kita harus membangun hidup rukun dan berdampingan dengan suku lain” sebanyak 70,5% responden menjawab sangat setuju, 28,2% memilih setuju dan hanya 0,9% memilih kurang setuju serta 0,5% yang tidak setuju sama sekali. Meski agak menurun frekuensinya untuk pernyataan berikutnya yang berbunyi “Kita harus hidup rukun dan berdampingan dengan penganut agama lain” sebanyak 67,7% responden sangat setuju, 29,5% setuju, yang kurang setuju 1,8 0% serta tidak setuju 0,9% atau 2 orang responden.

Pernyataan soal “Perbedaan dalam menganut agama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilarang oleh siapapun juga” dijawab sangat setuju sebanyak 72,7% oleh responden, 25,5% setuju, dan hanya 1,8 yang kurang setuju. Begitupula dalam pernyataan berikut “Tidak mempermasalahkan jika di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dibangun tempat ibadah umat lain” 41,8% responden memilih sangat setuju, 43,6% setuju, frekuensi yang menolak juga cukup signifikan sebanyak 11,8% yang kurang setuju dan 2,7% tidak setuju. Pertanyaan berikut menanjak lagi dalam soal “Menghormati teman yang beribadah sesuai keyakinannya” sebanyak 81,8% sangat setuju, 17,3 setuju, dan hanya 0,9% yang memilih kurang setuju, yang tidak setuju nihil.

Yang menarik adalah soal penggunaan symbol, ketika menjawab pernyataan “Tidak boleh mengenakan simbol-simbol keagamaan di sekolah” hanya 11,8% yang sangat setuju, 24,5% memilih setuju, cukup

dominan yang memilih kurang setuju yakni sebanyak 36,8% dan responden sebanyak 26,8% memilih tidak setuju sama sekali.

Dalam soal relasi dengan umat agama lain frekuensinya cukup baik terlihat dalam jawaban untuk pernyataan “Saya memberi ucapan selamat hari raya kepada penganut agama lain” sebanyak 63,2% responden sangat setuju, memilih setuju sebanyak 35,0% dan hanya 0,5% yang kurang setuju dan tidak setuju sama sekali sebanyak 1,4% responden. Soal keberadaan umat lain disekitarnya juga terlihat agak ragu responden menjaawabnya, hal ini terlihat untuk jawaban pernyataan “Saya tidak keberatan jika di sekitar tempat tinggal saya diadakan kegiatan peribadatan umat lain” sebanyak 45,5% saja yang memilih sangat setuju, 44,1% responden yang setuju, sisanya sebanyak 7,7% kurang setuju dan 2,7 tidak setuju.

Pola jawaban serupa juga terlihat untuk pernyataan “Saya mengizinkan teman kelas yang untuk tidak mengikuti kegiatan belajar kelompok karena mengikuti kegiatan agamanya” sebanyak 42,3% memilih sangat setuju 45,5% setuju dan ada 3,2% kurang setuju serta 9,1% memilih tidak setuju sama sekali.

Begitupala dalam pernyataan berikutnya yakni “Saya tidak mempermasalahkan jika ada tokoh agama lain diundang berceramah di sekolah saya” dijawab oleh responden 49,1% sangat setuju, 45,0% setuju dan terdapat 5,5% yang kurang setuju serta 0,5% tidak setuju. Untuk pernyataan berikutnya frekuensinya cukup tinggi “Saya akan memberi bantuan kepada teman/orang lain yang terkena musibah meski tidak seagama” dijawab oleh responden sebanyak 71,8% memilih sangat setuju, 25,5% memilih setuju dan hanya 2,3% responden memilih kurang setuju serta 0,5% yang tidak setuju sama

sekali. Dalam relasi pertemanan dengan yang berbeda agama juga cukup tinggi, hal ini terlihat dalam respon untuk pernyataan “Saya memiliki teman dekat yang berbeda agama dengan saya” sebanyak 65,0% memilih sangat setuju, 34,1% memilih setuju dan hanya 0,9% yang kurang setuju dan tidak ada yang tidak setuju.

Aspek Kepatuhan terhadap Hukum

Aspek berikut yang diuji adalah Aspek Kepatuhan Terhadap Hukum yang terdiri dari 12 variabel. Pernyataan pertama adalah “Setiap warga negara Indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku di negara Indonesia” responden mayoritas menjawab 84,5% sangat setuju, 15,0% memilih setuju dan hanya 0,5% yang kurang setuju. Jawaban serupa diperoleh untuk pernyataan “UUD 1945 mampu menjadi pedoman dalam membangun kesejahteraan rakyat Indonesia” sebanyak 76,8% memilih sangat setuju, 21,4% setuju dan hanya 0,9% yang kurang setuju, serta 0,9% saja yang tidak setuju. Begitu pula untuk pernyataan berikut yang berbunyi “UUD 1945 mampu mewujudkan keadilan dalam bidang hukum tanpa memandang golongan, suku, dan agama” sebanyak 71,8% memilih sangat setuju, 23,6% memilih setuju, dan terdapat 3,2% yang kurang setuju, serta 1,4% memilih tidak setuju.

Yang menarik adalah dalam aplikasinya untuk penegakan hukum agak menurun frekuensinya. Hal ini terlihat dalam pernyataan “Saya tidak akan melakukan pembelaan jika keluarga saya ada yang terlibat kasus korupsi” 46,8% yang memilih sangat setuju, 38,2% responden setuju, dan terdapat 9,5% yang kurang setuju serta 5,5% yang tidak setuju sama sekali. Terkait dengan “Aksi main hakim sendiri dapat dibenarkan jika dilakukan terhadap para

pelaku kriminal seperti begal” terdapat sebanyak 15,0% memilih sangat setuju, 27,3% responden setuju serta 34,1% yang kurang setuju dan 23,6% yang tidak setuju.

Soal kewajiban terhadap Negara dalam pernyataan “Setiap warga negara wajib membayar pajak” sebanyak 57,3% responden memilih sangat setuju, 36,4% memilih setuju, 5,5% kurang setuju dan hanya 0,9% yang tidak setuju. Hal menarik adalah soal tingginya upaya negosiasi untuk kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, terlihat dalam jawaban responden untuk pernyataan “Jika saya ditilang di jalan karena melanggar aturan lalu lintas, saya akan mengajak damai polisi yang menilang saya” sebanyak 17,7% responden memilih sangat setuju, 33,6% setuju, sedangkan yang memilih kurang setuju sebanyak 25,5% responden dan hanya 23,2% responden yang mantap memilih tidak setuju.

Penerimaan terhadap konstitusi Negara cukup baik terlihat dalam jawaban untuk pernyataan “UUD 1945 merupakan konstitusi yang sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia” 53,6% responden memilih sangat setuju, 43,2% responden setuju, 1,4% responden kurang setuju dan 1,8% yang tidak setuju. Hal berikut kembali terkait dengan kepatuhan terhadap hukum ini terlihat menurun lagi frekuensinya “Saya diam saja jika melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib” sebanyak 19,5% responden memilih sangat setuju, 23,2% yang setuju, 25,9% responden kurang setuju dan 31,4% memilih tidak setuju.

Variable berikut berbunyi “Saya ikut membantu saat ada kerja bakti di sekolah” mayoritas responden memilih sangat setuju yakni sebanyak 66,4%, 30,9% setuju dan hanya 1,8% yang kurang setuju serta 0,9% yang tidak setuju sama sekali. Variabel selanjutnya soal kepatuhan terhadap

pemimpin dengan pernyataan “Saya akan patuh terhadap pimpinan nasional/daerah yang dipilih secara demokratis, meski bukan pilihan saya” sebanyak 58,6% yang memilih sangat setuju, 35,5% responden yang setuju, 4,5% yang kurang setuju, serta 1,4% yang tidak setuju.

Yang menarik bahkan bisa menolak tokoh agama jika menolak konstitusi terlihat dalam variable “Saya tidak akan mendengarkan tokoh agama saya jika menolak UUD 1945 dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.” Sebanyak 34,1% responden yang memilih sangat setuju, 37,7% yang setuju, meski terdapat 28,2% yang menolak, terdiri dari 18,2% yang kurang setuju serta 10,0% yang tidak setuju sama sekali.

Faktor Pembentuk Nasionalisme Siswa Kristen di Ambon

Salah seorang pengawas yang sebelumnya merupakan guru SMA dalam Al Kitab terdapat beberapa ayat yang memerintahkan untuk menjaga Negara dan bangsa tempat umat Allah berdiam agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan, misalnya saja dalam (Tawarikh 7:14) terdapat firman Tuhan yang berbunyi "... jika umat-Ku memanggil nama-Ku, merendahkan diri, berdoa dan mencari Aku, serta meninggalkan jalan yang jahat, maka Aku akan mendengar mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka."

Senada, seorang informan, Heppy Lelapary, menyatakan, kebanggaannya ketika penulis berusaha mengonfirmasi respon para siswa yang menunjukkan tingginya frekuensi untuk aspek kecintaan terhadap Negara, Pancasila dan penghargaan terhadap hukum dan konstitusi. Menurutnya, terdapat dalam ajaran agama Kristen termuat

banyak isyarat Tuhan untuk membela negara, menghormati para pemimpin, dan perangkat pemerintahan. Hal ini dapat dilihat di antaranya ketika Paulus menasihati orang Kristen untuk berdoa bagi Negara mereka (Timotius 2:1-2) yang berbunyi “Pertama-tama, aku menasihatkan kamu untuk menaikkan permohonan, doa, doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang, bagi raja-raja, dan semua orang yang duduk di pemerintahan supaya kita dapat menjalani hidup yang tenang dan damai dalam segala kesalehan dan kehormatan”.

Semua orang yang dimaksud di sini tentu bukan hanya presiden dan wakilnya, tapi juga perangkatnya dari menteri, para hakim, tentara, polisi guru dan semua mereka yang merupakan unsur pemerintahan. Penting untuk selalu berdoa agar orang-orang yang duduk di pemerintahan agar terjaga dalam pemeliharaan Tuhan, orang Kristen yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah maka dia akan memulihkan negeri mereka.

Selain itu banyak sekali firman Tuhan yang dapat menjadi rujukan pentingnya bela Negara dan pemerintahan yang sah, dalam Roma 13:1 berbunyi “ Tiap orang harus tunduk/takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah”. Selanjutnya dalam Mat 22:21 kurang lebih berbunyi “ berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.”

Dalam beberapa variable yang diukur salah satu yang terlihat cukup rendah frekuensinya adalah soal penggunaan simbol-simbol keagamaan di sekolah. Dua dekade pasca pecahnya konflik Ambon yang memakan banyak sekali korban jiwa dan

setelahnya harta benda penggunaan symbol keagamaan memang terlihat cukup mencolok, pemuda beragama Islam jamak ditemui menggunakan kalung bulan bintang begitu dengan yang beragama Kristen memakai salib. Ruang public seolah menjadi arena kontestasi identitas keagamaan. Inilah salah satu dampak dari jarak sosial yang tercipta akibat adanya segregasi berdasarkan agama (wawancara. Y., 1 Agustus 2018). Itulah salah sebagian sebab, sehingga para siswa yang menjadi responden kurang sepatutnya jika penggunaan symbol keagamaan dibatasi karena merupakan simbol eksistensi diri. Pola perpisahan wilayah gaya anak muda yang terjadi ini menurut Hatib Abdul Kadir (2009:375) merupakan hasil dari proses perpotongan generasi yang terbentuk sepanjang kerusuhan.

Ambon kini sedang berproses menuju sebuah kota multikultur yang meskipun masih tersisa trauma konflik dalam ruang benak penduduknya (Ismail:2017). Kondisi psikologis masyarakat diperparah dengan terbentuknya pola segregasi pemukiman yang cukup ketat. Ismail (2017:134) melihat justru menambah bertumbuhnya atau terpeliharanya rasa trauma yang Nampak dalam sikap tidak percaya, takut, curiga kepada komunitas berbeda agama. Memori kelam konflik tidak akan hilang dari ingatan masyarakat, kita bisa melihat pada beberapa daerah baik komunitas mayoritas muslim maupun Kristen terdapat beberapa bekas rumah yang hancur ketika konflik tidak lagi berani ditempati oleh pemiliknya yang berbeda etnis maupun agama dengan warga mayoritas setempat, sebagai contoh pada sebuah lorong di daerah *Belakang Soya* terdapat bekas rumah keluarga Muslim yang hingga kini terlihat hancur tak terurus, begitu halnya yang terjadi di daerah mayoritas Muslim terdapat rumah-rumah yang tak

berani kembali ditempati oleh pemiliknya atau keluarga tersebut beberapa menjadi korban jiwa sepanjang konflik Ambon.

Pada bagian lain masyarakat yang berbeda keyakinan terlihat cukup nyaman menggunakan symbol keagamaannya di tempat-tempat umum, kita bisa melihat di pasar-pasar, di angkutan umum warga berjilbab berbaur dengan yang mereka yang terlihat menggunakan kalung salib, mall, kafe hingga pada festival music di berbagai tempat dibanjiri muda mudi menggunakan identitas keagamaan yang berbeda, mereka bisa berbaur dalam satu tempat yang sama tanpa terjadi kekisruhan.

Seorang siswi berjilbab (St. A) yang menempuh pendidikan di SMK daerah Silale yang mayoritas siswanya beragama Kristen menyebutkan selama ini cukup aman dan tidak pernah ada gangguan (Bullying) dari teman sekolah maupun dari tetangga dan masyarakat luas yang tidak seagama meski kemanapun pergi tetap menggunakan jilbab.

Dalam memelihara perdamaian di kota Ambon salah satu yang tak kalah penting adalah membuka Jaringan Antar Remaja (Remaja Islam dan Kristen). Jaringan antar remaja sangat efektif, karena remaja cara kerjanya cepat. Di samping itu, remaja juga membentuk pengamanan bersama seperti ketika umat Islam merayakan hari raya maka pemuda Gereja menjaga keamanan hari raya umat Islam begitu pun sebaliknya bila umat Kristen merayakan Natal dan Tahun baru maka remaja Islam menjaga keamanan hari raya umat Kristiani. Ini adalah salah satu program kerja FKUAB dalam menjaga perdamaian di kota Ambon (Hakis 2015)

Abidin Wakano, salah seorang aktifis di bidang budaya dan pendidikan agama, mengakui bahwa untuk scope kota Ambon, sebenarnya telah dibuat Peraturan daerah

(Perda) yang memasukkan kurikulum muatan lokal tentang budaya Pela-Gandong sebagai salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar hingga tamat sekolah lanjutan atas. Namun kendalanya adalah pada tahap implementasi yang belum dilaksanakan secara optimal dan komprehensif oleh pihak-pihak terkait.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya bersama antar komponen yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan hingga ke tahap eksekusi atau implementasi, agar apa yang telah diamanatkan dalam Perda tersebut bisa dilaksanakan dan diawasi secara baik hingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai.

Ambon pada dasarnya adalah sebuah negeri yang damai dengan berbagai nilai budaya yang dianut masyarakatnya. Istilah Ambon Manise merupakan sebuah slogan atau semboyan yang cukup terkenal bagi masyarakat Maluku. Slogan ini sangat populer bahkan bagi orang luar Maluku. Oleh sebab itu, menurut Resa Dandirwalu (2014:30), slogan ini secara komunal dapat menjadi citra diri bagi masyarakat Maluku, serta dapat menjadi sebuah norma yang mampu mengubah cara pandang dan perilaku sehari-hari.

Perilaku saling menghargai, tolong-menolong, dan rasa percaya, perilaku keseharian jauh sebelum konflik 1999 sangat baik dan dengan erat dipegang di kalangan masyarakat Maluku. Oleh sebab itu, jika ada anggota kelompok masyarakat yang tidak memiliki sikap tersebut, maka dia akan dianggap tidak memiliki identitas sebagai masyarakat Maluku. Totem Ambon Manise dapat menjadi totem baru bagi masyarakat Maluku, khususnya bagi masyarakat Ambon saat ini. Totem tersebut kemudian dapat menjadi citra diri bersama, untuk membangun kehidupan masyarakat komunal

untuk menciptakan kehidupan social yang terpadu tanpa ada halangan agama, ras, dan suku.

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Maluku sejak dahulu merekatkan hubungan masyarakat dapat menjadi system tanda yang hidup dan berkembang dalam ruang sejarah, sosial, politik dan lainnya. Budaya orang Basudara yang disebut dengan *hidup bae-bae* selalu hadir dan hidup dalam ruang benak anak negeri Maluku (Rosa Delima (Ed): 2016: 204), budaya Orang Basudara, *hidop bae-bae* merupakan ibu (induk) yang akan selalu menjadi benang berpilin untuk memutar jentera kehidupan bermasyarakat di tengah putaran arus globalisasi yang semakin kuat dan membuat penganutnya bisa kehilangan pegangan nilai falsafah ideologis. Ketika nilai budaya yang tetap hidup pada masyarakat Maluku ini dapat ditransformasi kepada generasi muda maka masa depan Maluku akan damai penuh persaudaraan.

Kehidupan yang menghargai perbedaan kultur, kemudian perbedaan itu dipakai sebagai kekuatan bersama telah diakui oleh pendahulu Anak Negeri Maluku sejak leluhur, sejarah nenek moyang orang Maluku yang multikultur berasal dari Seram, ada pula yang berasal dari Jawa, Irak, Persia, Arab dan lainnya yang kemudian setelah hidup bersama membentuk suatu identitas baru dengan tanggung jawab masing-masing (Weileruny, 2010:136). Sejarah ini membuktikan, menyangkut hubungan multikulturalisme, Anak Negeri Maluku telah menerimanya sebagai sesuatu yang wajar dan tidak ada pertentangan karena perbedaan itu.

Untuk meretas perbedaan dan membangun perdamaian pasca konflik beberapa tahun silam beberapa tokoh perdamaian lintas agama Maluku, yang didokong pemerintah provinsi Maluku

kemudian menggerakkan berbagai program berasaskan nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme yang telah mulai dikembangkan saat ini, antara lain; revitalisasi bentuk-bentuk kearifan lokal (*local wisdom*), pendidikan *youth camp*, pertukaran pemuda/mahasiswa lintas agama dan etnik serta *living values education*.

Beberapa program yang bersentuhan langsung dengan pendidikan formal di sekolah, seperti; Kurikulum Pendidikan Multikultural bagi Guru, Magang Mahasiswa Islam dan Kristen, dan *Live In* para guru lintas Agama. Program seperti ini diyakini dapat mengatasi *stereotyping* atau pemberian label kepada kelompok lain, baik positif atau negatif yang terjadi di Maluku sejak lama, sekaligus menjadi salah satu instrumen transformasi peradaban yang efektif dalam membangun perdamaian sejati di Maluku demikian Abidin Wakano dalam (Farid 2016).

PENUTUP

Secara umum persepsi kebangsaan siswa Kristen di Kota Ambon sangat tinggi ini terlihat dari beberapa Aspek yang dinilai; pada aspek NKRI dan cinta tanah air mayoritas siswa menerima dengan bulat bentuk Negara Kesatuan begitupula dengan aspek Penerimaan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang tidak bisa ditawar-tawar, demikian halnya untuk aspek kebhinnekaan. Meski demikian terdapat beberapa variable yang kurang disetujui oleh responden diantaranya soal sikap terhadap produk-produk buatan dalam negeri dan penggunaan produk bajakan, yang lain adalah soal jika ada pelarangan terhadap penggunaan symbol keagamaan di sekolah, aspek kepatuhan terhadap hukum merupakan satu aspek yang cukup rendah.

Terdapat beberapa factor yang

mempengaruhi tingginya aspek kebangsaan yakni penguatan atau sosialisasi yang cukup massif dilakukan pasca konflik Ambon dan berdasarkan ajaran agama Kristen. Terkait tren meningkatnya pemakaian symbol keagamaan di ruang publik dipengaruhi oleh penunjukan eksistensi diri yang juga dipengaruhi oleh segregasi pasca konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Hatib. 2009. *Bergaya di Kota Konflik; Mencari Akar Konflik Ambon Melalui Gaya Hidup Anak Muda*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Alhethail, R.M. 2015. "Exploring the perception of nationalism in the United States and Saudi Arabia". *Tesis*. Eastern Washington University. WA: Cheney.
- Brubaker, Rogers. 2012. *Nations and nationalism*. 18(1):2-20 · January
- BPS Ambon. 2017. *Ambon dalam Angka 2016*. Ambon. BPS Ambon.
- Cresswell, John W. 2016. *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Terj. Ahmad Fawaid dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1.
- Dandirwalu, Resa. 2014. Totem Ambon Manise. *Jurnal Antropologi Indonesia Volume 35 Nomor 1 2014*. Hal. 30-44
- Delima, Rosa (Ed). 2016. *Perdamaian Berbasis Adat orang Basudara*. PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Farid, Muhammad. 2016. "Dialog Dan Toleransi Beragama Di Kota Ambon: Perspektif Bekas Pejuang Muslim Ambon" 9: 44–50.
- Hakis. 2015. "Komunikasi Antar Umat Beragama Di Kota Ambon." *Komunikasi Islam* 05: 98–113.
- Haas, Ernst. 1997. *Nationalism, liberalism, and progress: The rise and decline of nationalism*. New York: Cornell University Press.
- KBBI Digital Offline (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 2019. Aplikasi android.
- Ismail, Arifuddin: 2017. Membedah Kerukunan Pasca Konflik di Kota Ambon. *Jurnal Al Qalam Nomor 23 Volume 1 Juni 2017*. Hal 1-14
- Ismail, Arifuddin: 2017. *Prahara yang Terselubung*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Trussmedia Grafika
- Leavitt, Harold J. 1978. *Managerial psychology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mertens, D.M. 2010. *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. Edisi ke-3. Thousand Oaks. CA: Sage.
- Prasetyo, B., Jannah, Lina M. 2011. *Metode penelitian kuantitatif: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, Anthony. 2013. *Nationalism*. New York: John Wiley.
- Sugiyono. 2007. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Pusat. 2007. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Trijono, Lambang. 2001. *Keluar dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Waileruny, Semuel. 2010. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Cetakan pertama. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar psikologi umum*. Yogyakarta: Andi Offset